



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14358/SEK/PW1.1.1/VIII/2025 Jakarta, 1 Agustus 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Publikasi QR Code Survei Penilaian Integritas 2025

- Yth
1. Para Sekretaris Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Terlampir;
 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Terlampir.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Mahkamah Agung RI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 dilakukan selama periode **Juli** sampai dengan **Oktober 2025**;
2. Untuk meningkatkan persentase pengisian survei oleh responden eksternal maka unit kerja diperintahkan untuk memublikasikan QR Code Pengisian Survei (<https://bit.ly/EKS-SPIMARI25>) di area pelayanan sampai dengan 30 Oktober 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. QR Code dipergunakan untuk pengisian survei responden eksternal masyarakat penerima layanan atau rekanan/penyedia pada unit kerja;
 - b. Bagi unit kerja yang tidak memiliki layanan publik, maka responden eksternal dimaksimalkan terhadap rekanan/penyedia yang pernah bekerja sama dengan unit kerja tersebut;
 - c. QR Code digunakan oleh seluruh unit eselon I dan satuan kerja yang terpilih menjadi sampel acak dalam pelaksanaan SPI 2025 (terlampir);
 - d. Pengadilan Tingkat Pertama menggunakan QR Code Pengadilan Tingkat Banding masing-masing;
 - e. Satuan kerja dapat menggunakan desain *background* QR Code dalam format yang *editable* yang dapat diakses pada tautan berikut:

Guideline : <https://bit.ly/GuidelineQRCode>
Google Drive : <https://bit.ly/GoogleDriveQRcode>
Link Canva Design : <https://bit.ly/QRcodeSPI>

Link terlampir tersedia dalam berbagai format, antara lain JPG, SVG, AI, DOC, PDF, dan PSD, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja.

Di dalamnya juga sudah terdapat panduan/*guideline* pembuatan QR Code.

3. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Hendra (0812-9584-246) atau Sdr. Syarif (0821-2213-7785).

Survei Penilaian Integritas (SPI) Mahkamah Agung RI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atas risiko korupsi, memetakan risiko korupsi, dan mengukur integritas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, agar Mahkamah Agung RI dapat merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem antikorupsi sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, Pimpinan Mahkamah Agung memerintahkan seluruh warga peradilan turut menyukseskan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Mahkamah Agung RI 2025.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Lampiran
Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 14358/SEK/PW1.1.1/VIII/2025
Tanggal : 1 Agustus 2025

DAFTAR SATUAN KERJA SAMPEL ACAK SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS 2025

NO	SATUAN KERJA
1	KAMAR PEMBINAAN
2	KAMAR PERDATA
3	KAMAR MILITER
4	KAMAR TATA USAHA NEGARA
5	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
6	KEPANITERAAN
7	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
8	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
9	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
11	BADAN PENGAWASAN
12	PENGADILAN PAJAK
13	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
14	PENGADILAN TINGGI GORONTALO
15	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
16	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
17	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
18	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
19	PENGADILAN TINGGI RIAU
20	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT
21	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
22	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
23	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
24	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
25	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
26	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

NO	SATUAN KERJA
27	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
28	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
29	PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
30	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
31	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
32	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
33	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
34	PENGADILAN NEGERI BANDUNG
35	PENGADILAN NEGERI BEKASI
36	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
37	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
38	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
39	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
40	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
41	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
42	PENGADILAN NEGERI MEDAN
43	PENGADILAN NEGERI SEMARANG
44	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
45	PENGADILAN NEGERI SURABAYA
46	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
47	PENGADILAN NEGERI TANGERANG
48	PENGADILAN NEGERI AMBON
49	PENGADILAN NEGERI DENPASAR
50	PENGADILAN NEGERI JEMBER
51	PENGADILAN NEGERI KENDARI
52	PENGADILAN NEGERI MANADO
53	PENGADILAN NEGERI MATARAM
54	PENGADILAN NEGERI PADANG
55	PENGADILAN NEGERI PALU
56	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
57	PENGADILAN NEGERI SLEMAN

NO	SATUAN KERJA
58	PENGADILAN NEGERI TEGAL
59	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
60	PENGADILAN NEGERI BANGIL
61	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
62	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
63	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
64	PENGADILAN NEGERI BARABAI
65	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU
66	PENGADILAN NEGERI BITUNG
67	PENGADILAN NEGERI BLORA
68	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
69	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
70	PENGADILAN NEGERI DEMAK
71	PENGADILAN NEGERI DOMPU
72	PENGADILAN NEGERI DONGGALA
73	PENGADILAN NEGERI GIANJAR
74	PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
75	PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG
76	PENGADILAN NEGERI KEDIRI
77	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
78	PENGADILAN NEGERI LUWUK
79	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
80	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
81	PENGADILAN NEGERI NGANJUK
82	PENGADILAN NEGERI PACITAN
83	PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
84	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN
85	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
86	PENGADILAN NEGERI PRAYA
87	PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
88	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT

NO	SATUAN KERJA
89	PENGADILAN NEGERI REMBANG
90	PENGADILAN NEGERI SALATIGA
91	PENGADILAN NEGERI SAMBAS
92	PENGADILAN NEGERI SAMPANG
93	PENGADILAN NEGERI SORONG
94	PENGADILAN NEGERI SUBANG
95	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
96	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
97	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
98	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
99	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG
100	PENGADILAN NEGERI BANJAR
101	PENGADILAN NEGERI BANTAENG
102	PENGADILAN NEGERI BATULICIN
103	PENGADILAN NEGERI BELOPA
104	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG
105	PENGADILAN NEGERI CALANG
106	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA
107	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
108	PENGADILAN NEGERI KASONGAN
109	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU
110	PENGADILAN NEGERI KOTABARU
111	PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
112	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
113	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
114	PENGADILAN NEGERI LASUSUA
115	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
116	PENGADILAN NEGERI MENTOK
117	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
118	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH
119	PENGADILAN NEGERI NATUNA

NO	SATUAN KERJA
120	PENGADILAN NEGERI NEGARA
121	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
122	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
123	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
124	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
125	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
126	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
127	PENGADILAN NEGERI RAHA
128	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
129	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
130	PENGADILAN NEGERI RUTENG
131	PENGADILAN NEGERI SANANA
132	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
133	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
134	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
135	PENGADILAN NEGERI SINABANG
136	PENGADILAN NEGERI SINGKIL
137	PENGADILAN NEGERI SINJAI
138	PENGADILAN NEGERI SOA-SIO
139	PENGADILAN NEGERI SUKADANA
140	PENGADILAN NEGERI TANJUNG
141	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
142	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEB
143	PENGADILAN NEGERI TEBO
144	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
145	PENGADILAN NEGERI TUAL
146	PENGADILAN NEGERI UNAAHA
147	PENGADILAN NEGERI UNGARAN
148	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI
149	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
150	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

NO	SATUAN KERJA
151	PENGADILAN AGAMA CILACAP
152	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU
153	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
154	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
155	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
156	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
157	PENGADILAN AGAMA JAMBI
158	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA
159	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
160	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
161	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
162	PENGADILAN AGAMA MATARAM
163	PENGADILAN AGAMA PADANG
164	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
165	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
166	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
167	PENGADILAN AGAMA SEMARANG
168	PENGADILAN AGAMA SLAWI
169	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
170	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
171	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
172	PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR
173	PENGADILAN AGAMA BANGIL
174	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
175	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
176	PENGADILAN AGAMA BATANG
177	PENGADILAN AGAMA BATURAJA
178	PENGADILAN AGAMA BIMA
179	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI
180	PENGADILAN AGAMA DEMAK
181	PENGADILAN AGAMA JOMBANG

NO	SATUAN KERJA
182	PENGADILAN AGAMA KALIANDA
183	PENGADILAN AGAMA KUDUS
184	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
185	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU
186	PENGADILAN AGAMA LUWUK
187	PENGADILAN AGAMA MAGETAN
188	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
189	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH
190	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
191	PENGADILAN AGAMA MUNGKID
192	PENGADILAN AGAMA PACITAN
193	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
194	PENGADILAN AGAMA PAREPARE
195	PENGADILAN AGAMA PINRANG
196	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
197	PENGADILAN AGAMA REMBANG
198	PENGADILAN AGAMA RENGAT
199	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
200	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
201	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN
202	PENGADILAN AGAMA TEGAL
203	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
204	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
205	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
206	PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
207	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
208	MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
209	MAHKAMAH SYAR'YAH BLANGKAJEREN
210	MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA SUBULUSSALAM
211	MAHKAMAH SYAR'YAH KUTACANE
212	MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI

NO	SATUAN KERJA
213	MAHKAMAH SYAR'ITYAH TAPAK TUAN
214	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO
215	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
216	PENGADILAN AGAMA BANTAENG
217	PENGADILAN AGAMA BARRU
218	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN
219	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU
220	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI
221	PENGADILAN AGAMA BONTANG
222	PENGADILAN AGAMA BOROKO
223	PENGADILAN AGAMA BUNTOK
224	PENGADILAN AGAMA BUOL
225	PENGADILAN AGAMA CILEGON
226	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP
227	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
228	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI
229	PENGADILAN AGAMA KANGEAN
230	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU
231	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
232	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN
233	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
234	PENGADILAN AGAMA LABUHA
235	PENGADILAN AGAMA LOLAK
236	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING
237	PENGADILAN AGAMA MAGELANG
238	PENGADILAN AGAMA MALILI
239	PENGADILAN AGAMA MENTOK
240	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
241	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH
242	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
243	PENGADILAN AGAMA NABIRE

NO	SATUAN KERJA
244	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH
245	PENGADILAN AGAMA NEGARA
246	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
247	PENGADILAN AGAMA PAINAN
248	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG
249	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE
250	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI
251	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI
252	PENGADILAN AGAMA PARIGI
253	PENGADILAN AGAMA PENAJAM
254	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
255	PENGADILAN AGAMA PUTUSIBAU
256	PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG
257	PENGADILAN AGAMA SANGGAU
258	PENGADILAN AGAMA SELAYAR
259	PENGADILAN AGAMA SERUI
260	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
261	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
262	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG
263	PENGADILAN AGAMA SINJAI
264	PENGADILAN AGAMA SOA SIO
265	PENGADILAN AGAMA SOREANG
266	PENGADILAN AGAMA SUKADANA
267	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH
268	PENGADILAN AGAMA TANJUNG
269	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI
270	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN
271	PENGADILAN AGAMA TARAKAN
272	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN
273	PENGADILAN AGAMA TOLI-TOLI
274	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH

NO	SATUAN KERJA
275	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG
276	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU
277	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
278	PENGADILAN MILITER I - 06 BANJARMASIN
279	PENGADILAN MILITER I - 07 BALIKPAPAN
280	PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG
281	PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA
282	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
283	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
284	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO
285	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
286	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
287	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
288	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
289	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK
290	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
291	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto